

**PENGARUH RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

FITRI RAMADHANI
NIM: 181000462201024

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

2022

**PENGARUH RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017-2020**

FITRI RAMADHANI
NIM: 181000462201024

Pembimbing 1: Dr. Lili Wahyuni, S.E., M.Si.

Pembimbing 2: Witra Maison, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). Analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *R-Square* dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, serta secara simultan Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

**THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME RATIO ON
FINANCIAL PERFORMANCE ON REGENCY AND CITY GOVERNMENTS
IN WEST SUMATRA PROVINCE
YEAR 2017-2020**

**FITRI RAMADHANI
NIM: 181000462201024**

Mentor 1: Dr. Lili Wahyuni, S.E., M.Si.

Mentor 2: Witra Maison, S.E., M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the ratio of regional taxes, the ratio of regional levies, the ratio of the results of separated regional wealth management, the ratio of other legitimate regional revenues on the financial performance of the regional government. The sample used is 19 districts/cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sampling technique used was total sampling. The type of data used is secondary data in the form of financial reports obtained from [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, R-Square coefficient of determination and hypothesis testing.

The results showed that each of the variables of the Regional Tax Ratio, Regional Retribution Ratio, Separate Ratio of Regional Wealth Management Results, Other Legitimate Regional Original Income Ratios affect the Financial Performance of Regional Governments, as well as simultaneously Regional Tax Ratios, Regional Levies Ratio, Ratio of Results of Separated Regional Wealth Management and Other Ratios of Legitimate Regional Original Income affect the Financial Performance of Regional Governments.

Keywords: Regional Tax Ratio, Regional Retribution Ratio, Separate Ratio of Regional Wealth Management Results, Other Legitimate Regional Original Income Ratios, Regional Government Financial Performance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi pada pertengahan tahun 1998, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Reformasi di Indonesia ini turut mengubah sistem kehidupan negara, seperti adanya tuntutan *Good Governance* dan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, judikatif, dan legislatif. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Era Reformasi diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada Presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD.

Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan

otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan, (Halim 2007;229). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Otonomi daerah adalah wewenang suatu daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang, sedangkan daerah otonomi adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada pada daerah tertentu dan daerah tersebut sudah di beri hak untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Otonomi itu sendiri berarti penyerahan wewenang atau urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan di daerah sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, (Widjaja 2002).

Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, (Fahmi 2012;2). Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya terletak pada pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal.

Rasio desentralisasi fiskal dapat menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Berdasarkan pasal 31 ayat 1 PP No. 19 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan suatu daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah

melalui penggalian sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny 2012). Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Florida (2007) yang mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti Pajak Hotel, Hiburan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber kekuatan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. Sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, (Siahaan 2005). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang tentunya

akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Penelitian Florida (2007) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sama seperti pajak daerah yang memiliki kontribusi pada pendanaan PAD, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah kota/kabupaten, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi persentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Selain itu Wenny (2012) telah melakukan penelitian tentang analisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian Wenny (2012) membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Halim dan Kusufi (2012:104) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah sehingga mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Hasil perusahaan milik daerah merupakan keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang dipisahkan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Maka sifat perusahaan daerah adalah menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah menjadi suatu kesatuan produksi.

Penelitian Florida (2006) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wenny (2012) tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, (Halim, 2004). Jenis Lain-lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian, Cherrya Dhia Wenny (2012) menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya, (Ebit, 2012). Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah dapat mengakibatkan penurunan PAD sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah dapat meningkatkan PAD daerah maka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah menjadi tidak terhambat.

Hasil penelitian Dian Nofriana Batubara, (2019) menyimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Sementara secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian yang dilakukan Dhia Wenny, (2012) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara signifikan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah Rasio Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah Rasio Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Apakah Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Apakah Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Apakah Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.
2. Sebagai masukan bagi instansi pemerintahan daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.
3. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat pada penyusunan draf proposal ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak – pihak terkait, dan sistematika penulisan atas penyusunan proposal ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori-teori yang berkaitan, penjelasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, varibel penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari penelitian dan

saran- saran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat penelitian dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Rasio Pajak Daerah, Rasio Retribusi Daerah, Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Rasio Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini menggunakan 76 sampel Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian untuk variabel Rasio Pajak Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 12,514 \geq$ nilai $t_{tabel} 1,9934$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya Rasio Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
2. Hasil penelitian untuk variabel Rasio Retribusi Daerah (X2) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 6,729 \geq$ nilai $t_{tabel} 1,9934$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya Rasio Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
3. Hasil penelitian untuk variabel Hasil Rasio Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 10,598 \geq$ nilai $t_{tabel} 1,9934$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

4. Hasil penelitian untuk variabel Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah (X4) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 8,606 \geq nilai t_{tabel} 1.9934 dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya Rasio Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
5. Nilai Adjusted R square sebesar 0,943 atau 94,3% Hali ini berarti 94,3% dari variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan dipengaruhi variabel oleh variabel independen yaitu Rasio Pajak Daerah (X1), Rasio Retribusi Daerah (X2), Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (X3), Rasio Lain-Lain PAD yang Sah (X4). Sedangkan 5,7% diterangkan oleh variabel lain seperti Dana Perimbangan menurut (Salman Alfari, 2015)

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah

1. Pemerintah provinsi Sumatera Barat diharapkan perlu meningkatkan PAD secara lebih intensif dan aktif, dengan mengoptimalkan membuat masyarakat yakin dan percaya terhadap pemerintah daerah, dengan membuat program-program dan rencana dalam rangka pembangunan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik, agar dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan mengambil obyek provinsi yang berbeda dengan lingkup yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih luas sehingga kesimpulan yang diperoleh akan dapat digeneralisasikan untuk kondisi wilayah di Indonesia. Disarankan juga dapat menggunakan rasio keuangan lain untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu seperti rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Dri, A. S., & Febriansyah, F. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-67.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2013-2017. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 4(3), 32-41.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Ebit Halaskova. (2012), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Keuanga Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Vol 3 No 1 Tahun 2012*.
- Darise, Nurlan. (2009) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Indeks.
- Dian nofriana Batubara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuanga Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal. Buletin Ekonomi Vol. 11, No. 1, April 2019 hal 1-86*
- Elsera, G. D. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Florida, Yasin, M. (2007). Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(September).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Groves. (2001). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851.

- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hendro, Setyaningrum (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol 2, No.3.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Jumingan. (2006), Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Junarwati, J., Basri, H., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 6(2), 186-193.
- Juwita, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 3(1), 69-74.
- Mahmudi. (2016). Buku Teori Akuntansi. Penerbit PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Mahsun. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Matande, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Toraja Utara. *Economics Bosowa*, 5(001), 124-132.
- Merynda Puspitaningrum. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Ningsih, Kusumawardani. (2010). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1-22.

- Patriati, Zuraida, I. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 44
- Pelealu. Marabau (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 1, No.3*.
- Rantesalu, V. O., Sepang, S. M., & Rorah, I. R. C. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Doctoral dissertation, Universitas Katolik De La Salle).
- Sekaran, U. (2013) *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Selemba Empat.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 26-42.
- Soekarwo Hasiah. (2003). Pendapatan Asli Daerah dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Volume 15 Nomor 2, 2017. Halaman 163-176
- Subowo, Juniati, (2010) Pengukuran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Strategi Akuntansi*. Volume 2, No.2: 105-130
- V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyuningsih, Y. E. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. In *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP (Vol. 2, No. 1, pp. 39-51)*. STIE MDP.

Widjaja, Mardiah. (2002). Pendapatan Asli Daerah dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Volume 15 Nomor 2, 2002. Halaman 163-176

Yuli Adriansyah. (2009). Perbandingan indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatra Bagian Selatan. Jurnal Strategi Akuntansi. Volume 2, No.2: 105-125

